

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Effendy, M. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Kedua*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Schafer, S. (1968). *The victim and his criminal: A study in functional responsibility*. New York, NY: Random House.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo. 2013. *Hukum pidana di bidang teknologi informasi (cybercrime law): Telaah teoritik dan bedah kampus*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yuhelson. 2017. *Pengantar ilmu hukum*. Gorontalo: Ideas Community.

### B. Jurnal Ilmiah

- Adiyanta, F. C. Susila. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(4), 697.
- Andarsyah, R. 2022. Implementasi metode first in out (FIFO) pada aplikasi jual beli aset digital berbasis Android. *Jurnal Teknik Informatika*, 14(1), 60–61. <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/informatika/issue/view/132>
- Andayani, & Yulianti. “Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Case Law: Journal of Law* 8, no. 1 (2026). <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/caselaw/article/view/5701>
- Any, Ismawati. (2011). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia). *Jurnal Pranata Hukum*, 6(1), 55–68. Diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/154/153>
- Balahontsev, V., Tsikhilov, A., & Norta, A. 2019. *A decentralized blockchain system for the attestation and authorization of digital assets (Version 0.8c)*.
- Bawole, Herlyanty. “Perlindungan Hukum bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Lex et Societatis* 9, no. 3 2021: 16–24.
- Fachrie, Yogie, Aria Zurnetti, dan Irzal Rias. “Implementasi Restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/RES.PID/2023/PN BKT).” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (2025): 4898–4908
- Hapsari, R. D., & Pambayun, K. G. 2023. Ancaman cybercrime di Indonesia: Sebuah tinjauan pustaka sistematis. *Jurnal Konstituen*.
- Hutomo, Priyo & Soge, Markus Marselinus. (2021). Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer. *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 46.

- Nolasco, Claire Angelique R. I., Vaughn, Michael S., & del Carmen, Rolando V. (2010). *Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice. Journal of Criminal Justice Education*, 21(1), 9.
- Yuliati, R. W. 2017. *Kompensasi bagi korban tindak pidana* (Skripsi sarjana). Universitas Indonesia, Depok.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 254.
- Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

### **D. Laman Internet**

- Amalia, Azizah. "Mendorong RUU KUHAP Menuju Mekanisme Restitusi Korban yang Humanis dan Progresif." *Hukumonline*. Diakses 10 Maret 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-ruu-kuhap-menuju-mekanisme-restitusi-korban-yang-humanis-dan-progresif-lt683fc0773398a>

- Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Ditinjau dari Perspektif Restoratif Justice.” Diakses 27 April 2026. <https://bsdk.mahkamahagung.go.id/id/pustrajak-id/dok-keg-pustrajak-id/731-perlindungan-korban-dalam-sistem-peradilan-pidana-ditinjau-dari-perspektif-restoratif-justice.html>
- Kasidi, Lili. 2022. “Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial.” Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra. Diakses 27 April 2026. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2026). *Tugas & wewenang*. Diakses 1 Februari 2026, dari <https://www.kejaksaan.go.id/about/mision>
- Pengadilan Negeri Tabanan. (n.d.). *Pengajuan restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana*. Diakses 11 Maret 2026, dari <https://pn-tabanan.go.id/berita/detail/pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana/6855456e2fe46a9d49d3d3af4f57443d>
- Pramudana, Y. (2025, September 19). *Restitusi, pelindungan bagi korban tindak pidana*. MariNews Mahkamah Agung.
- Pramudana, Y. (n.d.). *Kompleksitas eksekusi restitusi oleh kejaksaan*. MariNews Mahkamah Agung. Diakses 10 Maret 2026.
- Prakoso, Adji. “Penerapan Pemberian Restitusi kepada Korban Tindak Pidana.” *MariNews Mahkamah Agung*. 28 Februari 2025.